



**ANALISIS KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN
(STUDI KEPEMIMPINAN TRIYONO BUDI SASONGKO SEBAGAI BUPATI
PURBALINGGA PERIODE 2000-2010)**

SKRIPSI

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata-1
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh :

INSAN AZZAMIT

14010112140152

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2016

ABSTRAK

“Analisis Kepemimpinan Pemerintahan (Studi Kepemimpinan Triyono Budi Sasongko sebagai Bupati Purbalingga Periode 2000-2010)”

Insan Azzamit – 14010112140152
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

Sistem otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, maka dari itu kedudukan pemimpin pemerintahan sangat strategis. Hal tersebut terkait dengan pembahasan sosok kepala daerah, Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko yang terkenal dengan julukan “Bupati Sejuta Ide”, merupakan salah satu kepala daerah yang berhasil membawa perubahan besar bagi daerah yang dipimpin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepemimpinan pemerintahan Triyono Budi Sasongko sebagai Bupati Purbalingga periode 2000-2010.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dilaksanakan berdasarkan situasi wajar (natural setting) dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Instrumen penelitian dengan wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap sumber-sumber informasi yang dipilih menggunakan pertimbangan tertentu (purposive sampling) dan sumber informasi berasal dari berbagai yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian dari analisis kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko, adanya pengaruh yang besar dari pemimpin dalam menciptakan efektivitas kepemimpinan pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari pola, gaya kepemimpinan, serta faktor penentu efektivitas kepemimpinan. Pola kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, serta gaya kepemimpinan campuran antara kepemimpinan transformasional dengan kepemimpinan primal mampu menjadi daya dorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sehingga tercapai kemandirian daerah. Menemukan pula bahwa gaya kepemimpinan, kemampuan personal pemimpin menjadi faktor internal dan dukungan politik, administrasi pemerintahan, serta kualitas kebijakan menjadi faktor eksternal pendorong efektivitas kepemimpinan pemerintahan.

Rekomendasi yang diberikan kepada kepala daerah adalah pola dan gaya kepemimpinan transformasional dan primal yang harus terus dikembangkan, dan setiap kepala daerah harus mampu mengakomodir kepentingan dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan serta swasta sehingga tercipta efektivitas kepemimpinan pemerintahan.

Kata Kunci: Kepemimpinan Pemerintahan, Kepemimpinan Politik, Gaya Kepemimpinan, Efektivitas Kepemimpinan, Kepala Daerah

ABSTRACT

Analysis of Government Leadership (Leadership Studies Triyono Budi Sasongko as Purbalingga Regent Period 2000- 2010) "

Insan Azzamit – 14010112140152
Departement of Political and Government
Faculty of Social and Political Science
Diponegoro University Semarang

The system of regional autonomy provided the authority to manage the affairs of their own region. Therefore, the strategic position of government leaders are important. Besides that, its also important if a regent capable and competent on leadership and government science. That matter related to the discussion of head region, Purbalingga Regent, Triyono Budi Sasongko which is famous as the name of "brilliant regent" and one of the chief areas that managed to bring great changes to the area led. So, this journal made for analyze the government's leadership Triyono Budi Sasongko as Purbalingga Regent period 2000-2010.

The method used is a qualitative research, a case study approach. The research instrument with interviews, observation and documentation study conducted on the sources of information were selected using certain considerations (purposive sampling) and the resources derived from the government sector, publik sector, and private sector related research problems.

The results of the analysis of the government's leadership Triyono Budi Sasongko in the period 2000-2010 led Purbalingga: There are the influence of the leaders in creating effective government leadership. It can be seen from the pattern of leadership, leadership styles, as well as the determinants of efectivity leadership. Leadership that was close to the people, as well as a mix between leadership style transformational leadership with primal leadership which are capable of being thrust to boost publik participation in regional development so that the independence of the system in the form of community empowerment can be achieved. The study also found that the style of leadership, the ability of the leader personally into internal factors and political support, government administration, as well as the quality policy of external factors in stimulating the effectiveness of the government's leadership.

Recommendations are given to the regional head that the pattern and style of leadership transformational and primal should be able continue to developed, and the head of each region should be able to accommodate the interests of various sectors, which are the government and the society, to create the effectiveness of the government's leadership.

Keywords: Government Leadership, Political Leadership, Leadership Style, Leadership Effectiveness, Regional Head

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem politik desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, kegiatan dalam hal pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota diberi wewenang untuk mengatur urusan daerahnya sendiri kecuali pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri, agama, keuangan, dan bidang tertentu lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan. Dilihat dari sisi pemerintahan sebagai suatu organisasi maka kedudukan pemimpin pemerintahan sangat strategis, sangat penting jika Kepala Daerah pemerintahan menguasai ilmu kepemimpinan. Ilmu Kepemimpinan secara umum menunjukkan bahwa salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh Kepala Daerah adalah adanya inisiatif dan inovatif untuk mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

Terkait dengan pembahasan sosok Kepala Daerah yang memiliki ide-ide kreatif maka Bupati Kabupaten Purbalingga periode 2000-2010 yang terkenal dengan julukan “Bupati Sejuta Ide” Drs. H. Triyono Budi Sasongko, M.Si dengan segudang prestasinya merupakan salah satu Kepala Daerah yang berhasil membawa perubahan besar bagi daerah yang dipimpin. Drs. H. Triyono Budi Sasongko, M.Si menjadi Bupati Purbalingga dalam dua periode, periode pertama tahun 2000-2005, periode kedua pada tahun 2005-2010. Kabupaten Purbalingga adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang sangat potensial hampir disegala bidang seperti, pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan. Bidang pariwisata, Purbalingga memiliki Gua Lawa, Desa Wisata Karangbanjar, Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman, Ardi Lawet, Aquarium Purbasari. Bidang hasil pertanian, Purbalingga dikenal dengan duku yang berasal dari Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Sayur-mayur yang berasal dari Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja. Dalam bidang industri, Purbalingga memiliki pembuatan knalpot

bermotor, peralatan dapur dan rumah tangga. Di bidang perikanan, Purbalingga mempunyai ikan gurame yang dikembangkan sebagai hasil perikanan Kecamatan Mrebet.

Secara teoritis, Perkembangan dan kajian terkait dengan ilmu kepemimpinan masih perlu mendapat perhatian khusus, terutama masalah perbedaan kepemimpinan pemerintahan dan kepemimpinan swasta, Maka dari itu, topik kepemimpinan ini menjadi layak untuk diangkat kedalam skripsi mahasiswa Ilmu Pemerintahan karena Ilmu Pemerintahan akan meninjau permasalahan kepemimpinan lebih dalam dibanding bidang ilmu lain.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko dalam memimpin Kabupaten Purbalingga periode 2000-2010. Adapun permasalahan yang ingin di kaji dalam penelitian ini adalah untuk menjawab mengenai bagaimana kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko, serta bagaimana masa depan kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga pasca Bupati Triyono Budi Sasongko.

B. TINJUAN PUSTAKA

1. Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan pemerintahan adalah kepemimpinan di bidang pemerintahan atau kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan seperti diantaranya Bupati, Walikota dan atau Gubernur. Objek formasi kepemimpinan pemerintahan adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini yang memimpin adalah pemerintah sedangkan yang dipimpin adalah rakyatnya sendiri, objek materialnya adalah manusia.

a. Teori Pendekatan dan Gaya Kepemimpinan

Teori pendekatan kepemimpinan merupakan metode pendekatan untuk melihat bagaimana seorang pemimpin mampu mewujudkan efektivitas kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu perwujudan tingkah laku

dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Gaya kepemimpinan dalam hal ini menggunakan acuan pada gaya kepemimpinan transaksional, primal, humanistik, dan transformasional.

b. Sumber Kekuasaan Kepemimpinan

Kekuasaan kepemimpinan menjelaskan efektivitas kepemimpinan dari sudut pandang besarnya kekuasaan dan tipe kekuasaan yang dimiliki pemimpin serta cara penerapan kekuasaannya. Kekuasaan kepemimpinan dalam penulisan ini menggunakan lima sumber kekuasaan kepemimpinan, yaitu kekuasaan paksaan, kekuasaan resmi, kekuasaan imbalan, kekuasaan keteladanan, kekuasaan keahlian

c. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Efektivitas Kepemimpinan Pemerintahan

Faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan dalam kepemimpinan pemerintahan merupakan daya dorong dan penghambat yang dimiliki pemimpin dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan dalam kepemimpinan pemerintahan dibagi dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup gaya kepemimpinan yang diterapkan, dan perilaku pemimpin. Faktor eksternal mencakup dukungan politik, kualitas administrasi pemerintahan, serta kebijakan politik.

2. Psikologi Politik

Psikologi politik pada hakekatnya mempelajari kegiatan manusia dari segi-segi ekstern (lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa) maupun dari segi intern (kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi). Pembahasan terkait dengan psikologi politik tidak terlepas dari pembahasan kepribadian dan politik. Kebutuhan akan kekuasaan dan dominasi merupakan sebuah karakteristik kepribadian yang dipelajari, dimana secara khusus, terkait dengan para pemimpin.

C. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dilaksanakan berdasarkan situasi wajar (natural setting). Tujuan dari penelitian kualitatif untuk mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap kepemimpinan pemerintahan Drs. H. Triyono Budi Sasongko, M.Si sebagai Bupati Kabupaten Purbalingga periode 2000-2010.

Metode kualitatif merupakan metode dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk dapat mengkaji individu-individu, mengeksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa-peristiwa, atau mempelajari perilaku-perilaku dari individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu. Penelitian ini merupakan rancangan strategi studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mampu mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Purbalingga adalah daerah yang mendapat dampak langsung dari proses kepemimpinan pemerintahan Drs. H. Triyono Budi Sasongko, M.Si. Penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi kasus terhadap pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta yang ada di Kabupaten Purbalingga.

D. PEMBAHASAN

1. Kepemimpinan Pemerintahan

Pembahasan terkait dengan analisis kepemimpinan pemerintahan ini dilakukan melalui pendekatan kekuasaan kepemimpinan teori terkait dengan sumber kekuasaan pada kepemimpinan Menurut John R French, Jr. dan Betram

Raven yaitu: Kekuasaan Paksaan (*Coercive Power*), Kekuasaan Resmi (*Legitimate Power*), Kekuasaan Imbalan (*Reward Power*), Kekuasaan Keteladanan (*Referent Power*), dan Kekuasaan Keahlian (*Expert Power*). Pembahasan terkait dengan kekuasaan kepemimpinan akan menggunakan sumber-sumber diatas untuk melakukan analisis terkait dengan bagaimana Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si sebagai Bupati Kabupaten Purbalingga dipatuhi oleh pihak yang dipimpin. Analisis ini dilakukan karena kekuasaan erat kaitanya dengan bagaimana seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya.

Istilah pemimpin yang “*membumi*” ini nyatanya banyak diakui oleh berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Bupati Triyono dianggap sebagai contoh baik pemimpin yang merakyat, mendengar aspirasi masyarakat, dekat dengan kehidupan masyarakat umum, serta tidak ada sekat antara pemimpin dengan rakyatnya. Sperti yang ditegaskan oleh Ketua Dewan Kesenian Purbalingga, bahwa Bupati Triyono Budi Sasongko sebagai Bupati yang mampu mendengar aspirasi rakyat, menerima kritik dan saran dengan baik, serta mengerti kebutuhan masyarakat bawah.

Dari hasil penelitian, terkait dengan sumber kekuasaan kepemimpinan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko, maka pengaruh yang diberikan oleh Bupati Triyono kepada pemerintahan, swasta, serta masyarakat di Kabupaten Purbalingga bersumber dari Kekuasaan Personal yang terdiri dari Kekuasaan Keteladanan (*Referent Power*) dan Kekuasaan Keahlian (*Expert Power*). Muncul beberapa istilah dalam kepemimpinan Bupati Triyono Budi Sasongko, yakni pemimpin “*membumi*” dan pemimpin “*sejuta ide*” yang kekuasaanya bersumber dari Kekuasaan Keteladanan (*Referent Power*) dan Kekuasaan Keahlian (*Expert Power*).

2. Gaya Kepemimpinan

Davis dan Newstrom (1995) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan

atau diacu oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, ketrampilan dan sikap pemimpin dalam politik. Sedangkan menurut Tjiptono (2001:161), gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu (Heidjrachman dan Husnan, 2002:224). Dalam perkembangan kajian terhadap kepemimpinan, ada beberapa gaya kepemimpinan yang akhir-akhir ini berkembang pesat, antara lain, Kepemimpinan Transaksional, Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Primal, dan Kepemimpinan Humanistik.

Pembahasan terkait gaya kepemimpinan dianalisis dengan pendekatan perilaku personal pemimpin, dan pendekatan karakteristik kepemimpinan. Analisis dari kedua pendekatan tersebut menghasilkan bahwa, ciri primal leadership adalah kepemimpinan yang memiliki resonansi yang berfungsi menguatkan dan memperpanjang nada dampak emosi kepemimpinan. Pemimpin yang memahami visi dan nilai mereka sendiri dan dapat mengenali emosi kelompok, maka keterampilan manajemen mereka dapat menjadi katalisator pemercepat timbulnya resonansi. Artinya, pemimpin dalam hal ini adalah Bupati Triyono Budi Sasongko mampu menyalurkan visi-misinya dengan baik kepada semua pihak di Kabupaten Purbalingga, baik pemerintah, masyarakat, serta pihak swasta.

Dalam kepemimpinan transformasional, antara pemimpin dan bawahan terjadi kesamaan persepsi dengan tujuan dapat mengoptimalkan usaha mereka ke arah tujuan yang ingin dicapai organisasi. Oleh karena itu, diharapkan akan tumbuh kepercayaan, kebanggaan, komitmen, rasa hormat, dan loyal kepada atasan sehingga mereka mampu mengoptimalkan usaha dan kinerja mereka lebih baik. Sosok Bupati Triyono Budi Sasongko sebagai sosok yang mampu menyampaikan spirit pembangunan dengan baik kepada masyarakat maupun pihak lain di Kabupaten Purbalingga. Kemudian kemampuan Bupati triyono didalam memimpin purbalingga, diantaranya sebagai sosok yang memiliki karisma kepemimpinan,

dapat mempengaruhi bawahnya, mampu mendorong semangat kinerja, peduli terhadap pihak lain lebih dari sekedar hubungan kerja, serta sosok pemimpin yang mampu menginspirasi banyak pihak.

Peneliti mengkategorikan Bupati Triyono Budi Sasongko sebagai sosok pemimpin atau kepala daerah yang memimpin dengan Gaya Campuran, yakni antara Gaya Kepemimpinan Pimal dengan Gaya Kepemimpinan Transformasional.

3. Faktor Pendorong Efektivitas Kepemimpinan

Faktor pendorong dibagi ke dalam dua jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan yang berasal dari dalam diri pemimpin.

1) Gaya Kepemimpinan

Bupati Triyono Budi Sasongko merupakan sosok pemimpin yang menggunakan gaya campuran antar gaya kepemimpinan primal dengan gaya kepemimpinan transformasional. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya Bupati Triyono mendengar aspirasi masyarakat, turun langsung bawahan, ikut perkumpulan dan pertemuan kelompok masyarakat. Bupati Triyono juga merupakan sosok yang tidak henti-hentinya memberikan semangat pembangunan Purbalingga kepada semua pihak. Strategi terkait visi-misi yang bukan berfokus pada pembangunan masyarakat melainkan “masyarakat membangun” nyatanya mampu dipraktikkan dengan baik, berangsur-angsur hal tersebut menjadi spirit pembangunan yang mampu meningkatkan partisipasi publik di Kabupaten Purbalingga.

2) Kemampuan Personal Pemimpin

Faktor pendorong internal lainnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin, hasil penelitian menemukan ada enam kemampuan personal yang

dimiliki oleh Bupati Triyono Budi Sasongko sehingga mampu mendorong efektivitas kepemimpinan pemerintahan, yaitu:

a) Manajerial Pemimpin (*Supervisory Ability*)

Kemampuan Bupati Triyono Budi Sasongko dalam menjalankan fungsi manajerial tergambar dari rencana serta pelaksanaan strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

b) Akuntabilitas Pemimpin

Bupati Triyono Budi Sasongko yang berorientasi pada pencapaian serta prestasi peningkatan kerja menjadikan strategi kebijakan Kabupaten Purbalingga yang telah direncanakan mampu dilaksanakan. Sosok pemimpin yang terobsesi akan perubahan ini yang mendorong terciptanya efektivitas kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga.

c) Intelektual dan Kreatifitas Pemimpin

Bupati Triyono Budi Sasongko dipandang sebagai sosok yang cerdas terkait dengan pengembangan ide-ide. Artinya, kecerdasan dan kreativitas dinilai sebagai dasar dalam melihat peluang-peluang, masalah-masalah, sehingga tercipta program-program pembangunan yang berdampak besar bagi daerah.

d) Percaya diri (Kemampuan Politik) Pemimpin

Kemampuan Bupati Triyono dalam bidang politik dan pemerintahan dapat ditelusuri dari latar belakang sebelum menjadi Bupati Purbalingga. Kemampuan yang didukung dari latar belakang pekerjaannya sebelum menjadi Bupati Purbalingga, ternyata menjadikan sosok Bupati Triyono Budi Sasongko memiliki kemampuan yang baik dalam bidang manajemen strategis pembangunan daerah.

e) Ketegasan (*Decision Making*) Pemimpin

Sosok Bupati Triyono Budi Sasongko adalah sosok pemimpin yang tegas, mematuhi peraturan, menjalankan hukum dengan baik. Ketegasan

tersebut yang menjadi salah satu faktor penunjang kesuksesan saat menjabat sebagai bupati.

f) Inisiatif dan Inovatif Pemimpin

Pemikiran-pemikiran cemerlang dari Bupati Triyono Budi Sasongko menjadikannya dianggap sebagai bupati yang mampu melihat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, mampu melihat peluang, serta mampu menciptakan terobosan-terobosan kebijakan yang sangat inovatif. Maka dari itu, banyak dari berbagai sumber media menjuluki Bupati Triyono Budi Sasongko sebagai “Bupati Sejuta Ide”

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan yang berasal dari luar pemimpin.

1) Dukungan Politik

Keterlibatan pihak-pihak diluar pemerintah terhadap kebijakan pemerintah, baik terkait dengan pengambilan kebijakan umum maupun keterlibatannya di dalam pelaksanaan program pemerintah.

2) Kualitas Administrasi Pemerintahan

Bupati Triyono membawa sepuluh orang dari luar pemerintahan Purbalingga untuk ditempatkan pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahannya. Hal tersebut dilakukan oleh Bupati Drs. H. Triyono Budi Sasongko. M.Si agar tercipta perubahan etos kerja.

3) Kualitas Kebijakan Pemerintah

Dari berbagai program menunjukkan produktifitas baik secara kuantitas maupun kualitas dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada masa kepemimpinan Bupati Drs. H. Triyono Budi Sasongko. M.Si

Faktor internal pendorong efektivitas kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko terdiri dari gaya kepemimpinan dan kemampuan personal pemimpin. Faktor eksternal pendorong efektivitas kepemimpinan pemerintahan

Bupati Triyono Budi Sasongko terdiri dari dukungan politik, kualitas administrasi pemerintahan, dan kualitas kebijakan pemerintah.

4. Faktor Penghambat Efektivitas Kepemimpinan

Faktor penghambat dibagi ke dalam dua jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan yang berasal dari dalam diri pemimpin. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor internal penghambat efektivitas kepemimpinan adalah latar belakang politik Bupati Triyono Budi Sasongko. Triyono yang berasal dari PNS dan bukan merupakan kader dari Partai Politik (PDI) menjadi kendala tersendiri dalam persaingan kandidat calon Bupati Purbalingga dari partai PDI. Saat itu PDI menjadi pemenang pemilu 1999 sehingga hegemoni partai politik masih sangat besar, khususnya PDI sendiri.

Hal tersebut, menjadi awal kendala Bupati Triyono dalam menjadi Pemimpin di Purbalingga. Bupati Triyono harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Purbalingga terhadap dirinya. Bupati Triyono yang jauh lebih lama berkarir di Jakarta tentu kurang mengetahui dan memahami bagaimana perkembangan kondisi di Kabupaten Purbalingga, mulai dari kondisi pemerintahannya hingga kondisi struktural masyarakat Purbalingga.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan yang berasal dari luar pemimpin.

1) Keterbatasan Sumber Dana Pembangunan

Akibatnya mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah yaitu diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba

BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD. Selain itu sebagian besar kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dulu ditangani dan dibiayai oleh pemerintah pusat sekarang akan menjadi beban pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi pula pada Pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Bupati Drs. H. Triyono Budi Sasongko. M.Si mengakui bahwa keterbatasan dana menjadi penghambat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

2) Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berbagai pihak menyebutkan bahwa sosok dan tipikal kepemimpinan Bupati Drs. H. Triyono Budi Sasongko. M.Si yang baik, dinamis, progresif menjadi kendala tersendiri. Kendalanya adalah tipikal kepemimpinan Bupati Triyono yang terbuka dalam membangun Purbalingga secara demokratis, kadang menjadi tidak efektif karena tidak didukung dengan staf yang bisa mengimbangi kinerja Bupati Triyono

Faktor internal penghambat efektivitas kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko adalah latar belakang politik personal. Faktor eksternal penghambat efektivitas kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko terdiri dari keterbatasan sumber dana pembangunan dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

5. Masa Depan Kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga Pasca Bupati Triyono Budi Sasongko

Hasil penelitian menyimpulkan terkait analisis masa depan kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga pasca kepemimpinan Bupati Triyono Budi Sasongko bahwa sistem yang ditetapkan oleh Bupati Triyono masih dilanjutkan hingga saat ini, berbagai program pun masih terus dilakukan sampai sekarang. Pengembangan, peningkatan, dan perbaikan dari berbagai program yang dulu digagas Bupati Triyono masih terus dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Purbalingga saat ini. Hal-hal yang dirasakan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, hingga

masyarakat sipil di Kabupaten Purbalingga terkait dengan kepemimpinan Bupati Triyono dengan pasca kepemimpinannya lebih menjurus kepada sosok pemimpin itu sendiri.

Hal tersebut menandakan bahwa, meskipun masing-masing pemimpin memiliki gaya dan cara memimpin berbeda-beda. Banyak faktor yang mendasari pendapat tersebut, salah satunya adalah berbagai keberhasilan Bupati Triyono dalam memimpin Kabupaten Purbalingga. Keberhasilan tersebut menjadikan standar keberhasilan pemimpin setelahnya menjadi semakin tinggi. Meskipun demikian, inti dari uraian di atas adalah masa depan kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga pasca Bupati Triyono akan masih bergantung kepada sosok pemimpin yang inovatif, kreatif, penuh gebrakan, mampu menyalurkan semangat aka visi yang diusung, serta tetap dekat dengan masyarakat.

Masa depan kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga pasca Bupati Triyono Budi Sasongko masih bergantung kepada sosok pemimpin dalam hal ini adalah Bupati Purbalingga bukan kepada sistem pemerintahannya.

E. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

Setelah penelitian tersebut dilakukan, maka menemukan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- a. Cara memimpin pemerintahan yang dilakuakn oleh Bupati Triyono Budi Sasongko di Kabupaten Purbalingga mengemukakan istilah baru yakni pemimpin yang “membumi”, hal tersebut berdasarkan dari berbagai penilaian yang diuraikan dari berbagai pihak di Purbalingga.
- b. Gaya kepimpinan yang digunakan oleh Bupati Triyono Budi Sasongko dalam memimpin Kabupaten Purbalingga periode 2000-2010 menggunakan gaya kepemimpinan Campuran. Gaya kepemimpinan campuran tersebut terdiri dari gaya kepemimpinan primal dan gaya kepemimpinan transformasional.

- c. Faktor-faktor yang mendorong terciptannya efektivitas kepemimpinan Bupati Triyono Budi Sasongko terbagi menjadi dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal.
- 1) Faktor Internal
Faktor internal pendorong efektivitas kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko yakni gaya kepemimpinan yang digunakan dan kemampuan personal pemimpin. Kemampuan personal pemimpin meliputi; Manajerial Pemimpin (*Supervisory Ability*), Akuntabilitas Pemimpin, Intelektual dan Kreatifitas Pemimpin, Percaya Diri (Kemampuan Politik) Pemimpin, Ketegasan (*Decision Making*) Pemimpin, Inisiatif dan Inovatif Pemimpin.
 - 2) Faktor Eksternal
Faktor eksternal pendorong efektivitas kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko meliputi tiga hal yaitu; Dukungan Politik, Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kualitas Kebijakan Pemerintah.
- d. Faktor-faktor yang menghambat terciptannya efektivitas kepemimpinan Bupati Triyono Budi Sasongko terbagi menjadi dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal.
- 1) Faktor Internal
Faktor internal penghambat efektivitas kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko yakni Latar Belakang Politik Personal.
 - 2) Faktor Eksternal
Faktor eksternal penghambat efektivitas kepemimpinan pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko meliputi dua hal yaitu; Keterbatasan Sumer Dana Pembangunan dan Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- e. Masa depan kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga pasca kepemimpinan Bupati Triyono Budi Sasongko bukan tergantung kepada sistem, namun lebih

tergantung kepada sosok pemimpin itu sendiri, gaya kepemimpinan serta kemampuan personal dari pemimpin.

2. Rekomendasi

Sehubungan dengan saran akademik untuk pengembangan kajian dalam ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks pemahaman kepemimpinan pemerintahan maka saran-saran yang bisa direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan kajian dan penelitian yang mendalam terkait dengan kepemimpinan pemerintahan kepala daerah di daerah (Kabupaten/kota) lain.
- b. Karena gaya kepemimpinan serta faktor kemampuan personal pemimpin menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan efektivitas kepemimpinan pemerintahan kepala daerah maka perlu untuk lebih diterapkan didalam pengajaran dan pendidikan khususnya tentang kepemimpinan pemerintahan kepala daerah di jurusan ilmu pemerintahan.
- c. Terkait dengan fenomena munculnya kepala daerah dengan gaya dan kebijakan yang baru di Indonesia, maka perlu dilakukanya penelitian yang lebih mendalam dan terbuka terhadap segala aspek yang mempengaruhi kepemimpinan pemerintahan di daerah.
- d. Oleh karena pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, maka perlu dilakukan penelitian kuantitatif guna mengukur efektivitas kepemimpinan pemerintahan di daerah (Khususnya Kabupaten Purbalingga) melalui tingkat kepuasan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk melengkapi penelitian kualitatif yang telah dilakukan oleh peneliti.

Berkaitan dengan praktik kepemimpinan pemerintahan di daerah, maka saran-saran praktis berikut ini penting untuk meningkatkan kinerja kepala daerah dalam memimpin pemerintahan daerah agar lebih efektif lagi. Saran-saran praktis tersebut diantaranya adalah:

- a. Perlu dikembangkan karakteristik pemimpin yang “membumi” pada pemimpin daerah sebagai salah satu daya tarik berbagai pihak terutama masyarakat dalam mendukung berjalanya proses kepemimpinan pemerintahan.
- b. Diperlukan visi misi yang jelas dan realistis terutama dalam hal pembangunan daerah berdasar pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi public serta terciptanya efektivitas kepemimpinan kepala daerah.
- c. Diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya kualitas birokrasi di pemerintahan daerah agar mampu menyokong terciptanya visi dan misi dari kepala daerah.
- d. Secara umum, sistem pemerintahan Kabupaten Purbalingga yang sudah dibentuk oleh Bupati Triyono Budi Sasongko sudah baik dan perlu dilanjutkan dan dijaga oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di Kabupaten Purbalingga,
- e. Sistem pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Bupati Triyono Budi Sasongko di Kabupaten Purbalingga perlu dicontoh oleh daerah (Kabupaten/Kota) lain, guna menciptakan kemandirian daerah.
- f. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Bupati Triyono Budi Sasongko dalam memimpin Kabupaten Purbalingga perlu diadopsi oleh kepala daerah-kepala daerah lain baik yang sedang menjabat maupun yang akan menjabat, guna terciptanya efektivitas kepemimpinan dalam pembangunan daerah.

Demikian merupakan kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, semoga mampu menjadi pembelajaran bersama baik secara akademik maupun praktik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Budiarjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Setyono, Budi. 2004. *Birokrasi dalam Prespektif Politik & Administrasi*. Semarang: Puskodak Undip.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goelman, Daniel. Dkk. 2007. *PRIMAL LEADERSHIP Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Handoko, Hani. 2009. *Manajemen, Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Heidraja hman dan Husnan Suad. 2000. "Manajemen Personalialia". Yogyakarta: BPFE.
- Hoy, W. K. dan Miskel, C. G. 2005. *Educational Administration: Theory, Research, and Practice, 7th Edition*. New York: McGray Hill.
- Hoy, W.K. and Miskel, C.G. 2008. *Educational Administration: Theory, Research, and Practice, 8th Edition*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Istiqomah. 2010. *Social Entrepereurship (Belajar dari Purbalingga), Satu Dekade Kreativitas Drs. H. Triyono Budi Sasongko, M.Si*. Purwokerto: Prima Offset.
- J. Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Luthans, F. 1989. *Organizational Behavior 5th*. United State: McGraw-Hill, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kencana, Inu. 2009. *Keepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo:Jakarta
- Prasetyo,dkk. 2004. *Pendopo Untuk Rakyat: Jejak Langkah Bupati Sejuta Ide : Membangun Purbalingga dengan Visi dan Misi*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing
- Purwanto, Widi. 2006. *Untukmu Purbalingga (Biografi Bupati Purbalingga, Drs.Triyono Budi Sasongko, M.Si)*. Jakarta: Phibeta Aneka Gama.
- Purwanto, Widi. 2010. *Sepuluh Tahun Kepemimpinan Putra Daerah Membangun Purbalingga*. Purbalingga: Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : Penerbit Refika Aditama

Suradinata, Ermaya. 2008. *Kepemimpinan Daerah dan Nasional, Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Sutrisno. 2010. *Membedah Perjalanan Sang Penggagas: Historiografi Triyono Budi Sasongko*. Purbalingga: Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sweeney, P.D. and McFarlin, D.B. 2002. *Organizational Behavior: Solutions for Management*. New York: McGraw-Hill/Irwin.

Yulk, G. 2001. *Kepemimpinan dalam Organisasi 5th*. Edisi Terjemahan. Jakarta: PT Indeks.

Zaini, Subanto.2011.*Leadership in Action*.Jakarta: Elex Media Komputindo

B. Sumber Jurnal

Harman, E. 1994. *Accountability and Challenges for Australian Government's*. Australian Journal of Political Science.

C. Sumber Internet

<http://dinbudparpora.Purbalinggakab.go.id/>

<http://Purbalinggakab.bps.go.id/>

<http://owabong.co.id/>

http://eprints.undip.ac.id/16102/1/ACHMAD_ROFAI.pdf

http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf

<http://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf>

<http://herususilofia.lecture.ub.ac.id/2013/01/kepemimpinan-berbasis-kecerdasan-emosi/>

<http://matanews.com/2009/06/01/Purbalingga-tolak-carefour/>

<http://banyumasnews.com/2009/07/09/bupati-Purbalingga-raih-satya-lencana-wirakarya-bhakti-koperasi-ukm/>

<http://tasbara-bnpp.com/index.php/profil/organisasi/sekretaris-badan>

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purbalingga

D. Sumber Lain (Peraturan dan Perundang-Undangan)

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jakarta : New Merah Putih

Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Ekonomi Kabupaten Purbalingga 2013

Buku Evaluasi Pencapaian MDGs Kabupaten Purbalingga, 2013

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga

Data DPKAAD Kabupaten Purbalingga

Database TNP2K Prov Jateng, 2013

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten. 2007. *Best Practices Kebijakan Pembangunan Purbalingga*. Purbalingga: Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Kabupaten. 2010. *10 Tahun Bersama Membangun Purbalingga (Tahun 2000-2010). Kebijakan, Strategi, Langkah dan Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Purbaingg*. Purbalingga: Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Kabupaten. 2010. *Purbalingga Dalam Angka 2010 (Purbalingga in Figure 2010)*. Purbalingga: Bappeda dan Badan Pusat Statistika Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Kabupaten. 2010. *Purbalingga Dalam Angka 2014 (Purbalingga in Figure 2014)*. Purbalingga: Bappeda dan Badan Pusat Statistika Kabupaten Purbalingga

Pidato Bupati Purbalingga Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga Akhir Masa Jabatan Tahun 2000-2010

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah